

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenanda Media Group, Jakarta
- Maringka, Jan S., 2018, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Perwita, Anak Agung Banyu, Yanyan Mochamad Yani, 2014, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Richard, Steers M., 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitiji, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suwardi, Sri Setianingsih, dkk., 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Vienna Convention on Consular Relations, 24 April 1963*
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) : Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*
- Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)
- Singapore's Mutual Assistance in Criminal Matters Act*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi

JURNAL

Achmad B. Bakry, 2001, *Beberapa Aspek Reservasi Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Perspektif Vol. VI No. 4

Agwe Sheling Dranisa, dkk., 2022, *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille*, Jurnal Media Komunikasi Volume 4 Nomor 1

Ara Annissa Almi, 2022, *Mencandrai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia*, IPMHI Law Journal Vol. 2 No. 2

Ahmad Haris Junaidi, 2018, *Urgensi dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille*, Jurnal Rechtsvinding Vol.7 No.2

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*

David Tan, 2021, *Apostille Convention and Its Ramification Following the Accession of the Indonesian Legal Practices*, Padjajaran Journal of Law Volume 8 Number 3

LeeLee Stedman, 2001, *Legalization: The Apostille*, the Forum, Washington Vol. 77, Iss.1, <https://www.proquest.com/openview/a654a364a221d5c93862d9a003dfeabd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1059> diakses pada 3 Juni 2023

Marfuatul Latifah, 2016, *Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum Volume 7 No. 1

Michael Engelbert Theis dkk, 2020, *Reservasi Pan America System (PAN) Menurut Hukum Perjanjian Internasional*, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII No.3

Mutiara Hikmah, *Indonesia dan Konvensi Apostille*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/> diakses pada 15 Mei 2023

Monica Agustina Gloria, 2021, *Arti Penting Apostille Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing*, Jurnal Res Judicata Volume 4 No.1

Ricardo Santos, 2021, *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 1

Sanusi, 2019, Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1

Seyed Saeed Hashemi, 2020, *Apostille Convention and the Effect of its Accession on the Iranian Legal System*, the Judiciary Law Journal, Vol.84, Issue 112

Zulfa Djoko Basuki, 2013, *Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*, BPHN

INTERNET

Australian Government, "Portfolio of Minister for Justice Minister Assisting the Prime Minister fo CounterTerrorism," <https://www.ministerjustice.gov.au/Pages/Portfolio.aspx>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Mempertegas Central Authority Dalam Pelaksanaan Ekstradisi di Indonesia, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/mempertegas-central-authority-dalam-pelaksanaan-ekstradisi-di-indonesia>, diakses pada 10 November 2023

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, Indonesia Masih Menghadapi Masalah Dengan Central Authority, <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-masih-menghadapi-kendala-dengan-central-authority-9767>, diakses pada tanggal 10 November 2023

Kementerian Luar Negeri, 2022, Pemerintah Akan Sederhanakan Legalisasi Dokumen Publik Lewat Sertifikat Apostille, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3566/berita/pemerintah-akan-sederhanakan-legalisasi-dokumen-publik-lewat-sertifikat-apostille>, diakses pada tanggal 01 Juni 2023

Rohadatul Aisy, *Perbedaan Sistem Pemerintahan dan Parlemen Negara Australia dan Indonesia*, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

LAINNYA

Seminar Otoritas Pusat Di Kejaksaan Sebagai Suatu Kebutuhan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional, November 2018

Seminar Peranan Otoritas Pusat dalam Sistem Peradilan Pidana Menghadapi Kejahatan Transnasional, Surabaya, 16 November 2018

Kementerian Hukum dan HAM, 2019, Naskah Urgensi Pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*

Scott Simeon, *Office of International Affairs* sebagaimana disampaikan dalam *Focus Group Discussion Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Yogyakarta 28-30 November 2022